



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIKA HARINI
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN GEOGRAFI LINGKUNGAN
3. NHK : 823764

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.215.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 194 m2/175 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 402 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/150 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 225.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **199.500.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, KIA PICANTO SEDAN Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOTOR, HONDA KHARISMA Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
5. MOBIL, TOYOTA LGX Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
6. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **36.750.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.887.709.761
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.338.959.761
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.338.959.761

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.